

Analisis Penerapan Kiadah Ejaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024

An Analysis of the Application of Indonesian Spelling Conventions in President Joko Widodo's 2024 State Speech

Ade Almadun, Dedek Darvina, Shaqilla Putri Perdana, Eva Dwi Kurniawan

¹²³Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

⁴Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December, 2025

Revised 29 December 2025

Accepted 15 January 2026

Available online 17 January 2026

Keywords:

Kaedah Ejaan, Bahasa Indonesia,
Pidato Kenegaraan

Keywords:

Indonesian Spelling Rules, Indonesian
Language, State Address



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The state speech is the highest form of formal government communication in conveying information and policy direction to the public. Therefore, the use of Indonesian in this document must adhere to standard rules according to the Indonesian Spelling Guidelines (EYD V 2023). This study aims to identify spelling errors and provide recommendations for improvements in President Joko Widodo's 2024 State Speech. The research method used a qualitative descriptive approach with document analysis techniques. Data, in the form of speech texts published by ANTARA News, were then analyzed based on spelling error categories, including punctuation, capitalization, writing numbers and currency, loan terms/foreign words, diction/word choice, and sentence structure. The results showed 11 cases of spelling inconsistencies in the speech manuscript, spread across various sections of the text. The most dominant errors related to the use of capital letters and the writing of loan words that did not conform to KBBI rules. These findings indicate the need for a more rigorous editing process and the implementation of a language audit before the official speech manuscript is published. In this way, the quality of language in state communication can be improved so that it continues to reflect the identity and authority

of the national language.

ABSTRAK

Pidato kenegaraan merupakan bentuk komunikasi formal tertinggi pemerintah dalam menyampaikan informasi dan arah kebijakan kepada publik. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen tersebut harus mengikuti kaidah baku sesuai pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD V 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan ejaan dan memberikan rekomendasi perbaikan pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis dokumen. Data berupa teks pidato yang dipublikasikan oleh ANTARA News, kemudian dianalisis berdasarkan kategori kesalahan ejaan meliputi tanda baca, huruf kapital, penulisan angka dan mata uang, istilah serapan/kata asing, diksi/pemilihan kata, serta struktur kalimat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 kasus ketidaksesuaian ejaan dalam naskah pidato yang tersebar pada berbagai bagian teks. Kesalahan yang paling dominan terkait penggunaan huruf kapital dan penulisan kata serapan yang belum disesuaikan dengan kaidah KBBI. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya proses penyuntingan yang lebih ketat dan penerapan audit kebahasaan sebelum naskah pidato resmi dipublikasikan. Dengan demikian, kualitas kebahasaan dalam komunikasi kenegaraan dapat ditingkatkan sehingga tetap mencerminkan identitas dan wibawa bahasa nasional.

PENDAHULUAN

Menurut Pasiru (2024:144) bahasa merupakan sarana utama komunikasi manusia yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, membangun interaksi sosial, dan membentuk identitas kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks kebangsaan, Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang berperan sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan

*Corresponding Author

Email: adealmadun@gmail.com

tersebut menjadikan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah sekaligus simbol identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan Bahasa Indonesia secara konsisten dalam ranah formal menjadi upaya penting dalam menjaga kedaulatan bahasa dan keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan di tengah pengaruh globalisasi.

Oleh karena itu, kualitas penggunaan bahasa dalam komunikasi kenegaraan harus dijaga agar pesan tersampaikan secara tepat dan wibawa kebahasaan tetap terpelihara.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia merupakan bentuk komunikasi formal tertinggi dalam penyampaian laporan pemerintahan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato ini tidak hanya menyampaikan capaian kinerja dan visi pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan penggunaan bahasa baku bagi masyarakat, media, lembaga pendidikan, serta institusi negara lainnya. Naskah resmi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024 yang dipublikasikan melalui media nasional seperti ANTARA News menjadi dokumen kebahasaan yang semestinya merepresentasikan penerapan kaidah bahasa secara ideal. Kesalahan dalam penerapan ejaan, baik pada penulisan huruf kapital, kata serapan, maupun tanda baca, berpotensi menjadi model yang ditiru secara luas sehingga dapat menurunkan kualitas pembakuan bahasa nasional.

Kaidah ejaan Bahasa Indonesia diatur dalam pedoman resmi terbaru yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan EYD V Tahun 2023 yang menjadi dasar ketentuan penulisan kata dasar, kata berimbuhan, kata sambung, dan penggunaan tanda baca. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap penerapan kaidah ejaan pada teks pidato kenegaraan sebagai bentuk audit kebahasaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar resmi negara dan menjaga keharmonisan kaidah bahasa dalam ranah formal.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ripaldo (2024) dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita Kebumen24.com, membahas tentang pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi yang memiliki aturan dan pola tertentu dalam penyampaian makna. Setiap teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga disusun melalui struktur yang sistematis dan kaidah kebahasaan yang khas agar pesan dapat dipahami secara jelas dan efektif. Oleh karena itu, analisis struktur dan kaidah kebahasaan diperlukan untuk memahami bagaimana suatu teks dibangun, bagaimana hubungan antarkalimat terbentuk, serta bagaimana pilihan bahasa digunakan sesuai dengan tujuan, konteks, dan fungsi komunikatif teks tersebut.

Dan penelitian lain dilakukan oleh Siti Faida Rojahtun Putri dkk. (2023) dengan judul Analisis Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Berita Kebudayaan Nasional di Media Online Tempo, membahas tentang bagaimana teks berita kebudayaan nasional yang dimuat di media online Tempo disusun berdasarkan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Penelitian ini menganalisis unsur struktur berita seperti judul, teras berita, dan tubuh berita, serta mengkaji penggunaan kaidah kebahasaan yang mencakup pilihan diksi, jenis kalimat, penggunaan verba, keterangan waktu dan tempat, serta gaya bahasa yang objektif dan faktual. Hasil kajian menunjukkan bahwa teks berita kebudayaan di Tempo umumnya telah memenuhi karakteristik struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran dan analisis teks berita dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia.

Ejaan Bahasa Indonesia merupakan sistem kaidah yang mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca guna mewujudkan bahasa tulis yang baku dan efektif. Secara historis, ejaan bahasa Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Ejaan van Ophuijsen, Ejaan Republik, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), hingga disempurnakan melalui penetapan Ejaan Bahasa Indonesia Edisi V (EYD V) sebagai pedoman terbaru yang berlaku resmi.

EYD V disusun untuk menyesuaikan dinamika perkembangan bahasa serta kebutuhan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah formal dan kenegaraan, sehingga menjadi acuan utama dalam penyusunan naskah resmi negara, termasuk pidato kenegaraan presiden. Dalam konteks linguistik, kesalahan ejaan dipahami sebagai penyimpangan dari kaidah ejaan yang meliputi penggunaan huruf kapital, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Tanda baca sendiri memiliki peran penting dalam memperjelas struktur kalimat dan makna tuturan tertulis, karena kesalahan penggunaannya dapat menimbulkan ambiguitas makna dan mengganggu kejelasan pesan. Oleh karena itu, pidato kenegaraan sebagai bentuk komunikasi resmi negara dituntut memiliki tingkat ketepatan ejaan yang tinggi. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan penerapan EYD V dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024 serta memberikan usulan perbaikan ejaan dan tanda baca sesuai standar EYD V berdasarkan temuan analisis, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu kebahasaan dalam komunikasi resmi kenegaraan dan memberikan rekomendasi konstruktif bagi penyusun naskah pidato pemerintah.

METODE PENELITIAN

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan kaidah ejaan dalam pidato resmi negara dan merumuskan rekomendasi kebahasaan yang relevan. Dan di desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD V) Tahun 2023 pada teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024. Desain ini dipilih karena memungkinkan penelaahan mendalam terhadap data teks yang bersifat formal dan kontekstual tanpa melakukan intervensi terhadap objek. Objek penelitian adalah naskah pidato yang dipublikasikan oleh ANTARA News sebagai sumber resmi yang mudah diakses publik dan dianggap representatif sebagai dokumen kenegaraan sehingga hasil analisis diharapkan mencerminkan penggunaan bahasa resmi negara.

Bahan penelitian berupa teks pidato dalam format digital, dengan alat bantu analisis antara lain pedoman EYD V 2023 sebagai acuan kaidah penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk rujukan kosakata dan penyerapan kata serapan, serta daftar klasifikasi kategori kesalahan ejaan (misalnya huruf kapital, imbuhan, kata sambung, kata dasar/serapan, tanda baca). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi: pertama, mengunduh teks resmi pidato dari ANTARA News; kemudian melakukan penyimak detail terhadap seluruh isi pidato dengan fokus pada aspek ejaan; dan mencatat setiap bagian teks yang mengandung dugaan kesalahan ejaan ke dalam lembar temuan (coding sheet) untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Whitney, 1994), melalui tahap pengumpulan data, reduksi data dengan mengelompokkan kesalahan berdasarkan kategori kaidah EYD V, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi kesalahan untuk mempermudah interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebahasaan. Setiap temuan kesalahan diklasifikasikan berdasarkan indikator evaluasi: penggunaan huruf kapital, penulisan kata dasar dan berimbuhan, penulisan gabungan kata dan kata depan, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Dengan parameter ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana pidato resmi telah memenuhi standar kebahasaan formal, sekaligus menyajikan rekomendasi konkret untuk perbaikan naskah pidato di masa datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap naskah Joko Widodo (2024) dalam pidato kenegaraan sebagaimana diterbitkan oleh ANTARA News menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar teks telah menggunakan ejaan sesuai pedoman, terdapat sejumlah penyimpangan ejaan yang konsisten pada beberapa bagian. Berdasarkan analisis terhadap teks Pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2024, ditemukan beberapa aspek kesalahan EYD yang memerlukan perhatian. Analisis ini dikelompokkan menjadi enam aspek utama, yaitu tanda baca, huruf kapital, penulisan angka dan mata uang, istilah serapan/kata asing, diksi/pemilihan kata, serta struktur kalimat.

Pada data pertama ditemukan penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan ketentuan EYD V, yaitu pada kata *Dan* dan *sangat* di tengah kalimat dalam kalimat “Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil *Dan* Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.” Menurut EYD V, huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat, nama diri, atau unsur tertentu yang memiliki kekhususan, bukan pada konjungsi atau adverbial yang berada di tengah kalimat. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah dengan menggunakan huruf kecil pada kata *dan* serta *sangat*, sehingga kalimat tersebut menjadi “Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.” Kesalahan ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penerapan kaidah huruf kapital pada teks pidato kenegaraan.

Pada data kedua ditemukan kesalahan dalam penulisan istilah asing *smelter* yang tidak dicetak miring dalam kalimat “Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun *smelter* dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga...”. Menurut EYD V, istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf miring untuk membedakannya dari kosakata bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah *smelter* dengan huruf miring. Kesalahan ini menunjukkan bahwa penandaan istilah asing dalam teks resmi kenegaraan belum sepenuhnya mengikuti kaidah ejaan yang berlaku.

Pada data ketiga terdapat kesalahan penulisan kata *insyaallah* yang ditulis dengan huruf kecil pada awal kata dalam kalimat “*insyaallah* Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan.” Menurut EYD V, ungkapan yang berkaitan dengan nama Tuhan atau bersifat religius harus ditulis dengan huruf kapital pada unsur yang mengacu pada Tuhan. Oleh karena itu, penulisan yang sesuai adalah *InsyaAllah*. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya ketepatan dalam menerapkan kaidah huruf kapital pada ungkapan keagamaan dalam pidato resmi.

Pada data keempat ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca, khususnya tanda koma, pada kalimat sapaan “Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno”. Menurut EYD V, salam pembuka atau ungkapan sapaan harus diakhiri dengan tanda koma apabila diikuti oleh kalimat lanjutan, karena salam pembuka bukan merupakan kalimat berita yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, penulisan yang benar adalah “Yang saya hormati, Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,”. Kesalahan ini

menunjukkan bahwa penggunaan tanda koma dalam salam pembuka pada teks pidato kenegaraan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah EYD V.

Pada data kelima ditemukan kesalahan penulisan bentuk terikat yang berkaitan dengan penyebutan sifat Tuhan dalam kalimat “Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan.” Menurut EYD V, bentuk terikat maha- yang merujuk pada nama atau sifat Tuhan harus ditulis terpisah dan menggunakan huruf awal kapital sebagai bentuk pengkhususan. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah “Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan.”

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil yang dimuat dalam tabel dibawah, kesalahan yang ditemukan tidak mengubah makna pidato, tetapi perbaikan diperlukan untuk meningkatkan ketepatan bahasa, konsistensi, dan kerapian dokumen resmi.

Tabel 1. Distribusi kesalahan ejaan dalam pidato kenegaraan 2024

No	Cuplikan Teks Asli	Jenis Kesalahan	Perbaikan Sesuai EYD V	Pembahasan
1.	Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil Dan Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.	Huruf Kapital	Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.	Menurut EYD V penggunaan huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat atau nama orang. Sedangkan penggunaan pada kalimat tersebut di tengah kalimat.
2.	Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja.	Huruf Miring	Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja.	Menurut EYD V bahasa asing seharusnya dituliskan dalam bentuk huruf miring
3.	Insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan	Huruf Kapital	Insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan	Menurut EYD V huruf atau hal tertentu yang berkaitan dengan nama tuhan harus menggunakan huruf kapital.
4.	Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno	Tanda Koma	Yang saya hormati, Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno	Menurut EYD V salam pembuka harus diakhiri dengan tanda koma (,) apabila diikuti

				oleh kalimat lanjutan.
5.	Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan	Kata Turunan	Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan	Menurut EYD V bentuk terikat maha- dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan.

SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo Tahun 2024 pada dasarnya telah menggunakan kaidah EYD V 2023. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, khususnya pada aspek pemakaian huruf kapital, tanda baca, penulisan kata ulang dan kata berimbuhan, serta unsur serapan. Mengingat pidato kenegaraan merupakan dokumen resmi tertinggi negara yang menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, keberadaan kesalahan tersebut memperlihatkan bahwa proses penyuntingan naskah belum dilakukan secara maksimal.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya penerapan pengawasan bahasa yang lebih ketat sebelum naskah resmi dipublikasikan. Bahasa Indonesia dalam komunikasi kenegaraan bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi juga representasi identitas bangsa. Oleh karena itu, konsistensi penerapan kaidah kebahasaan harus menjadi perhatian utama.

Ke depan, diperlukan pembentukan tim penyunting bahasa yang berkompeten di lingkungan lembaga pemerintah, khususnya dalam penyusunan naskah pidato dan dokumen resmi negara lainnya. Pelatihan berkala mengenai pembaruan pedoman ejaan juga perlu diberikan kepada penulis dan editor naskah resmi agar lebih sensitif terhadap aspek kebahasaan. Dengan upaya tersebut, kualitas bahasa dalam komunikasi resmi negara diharapkan semakin meningkat dan mampu menjadi teladan bagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ranah publik.

REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Ejaan bahasa Indonesia (EYD) V*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Pasiru, M. (2024). Sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Mosikolah*, 4(1), 143–148.
- Putri Rojahtun, S. F., Wijaya, A. N., Sefia, W., Pasaribu, T. L., Anandi, M. R., Analiah, R. T., & Sunaryo. (2024). Analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita kebudayaan nasional di media online *Tempo*. *Jurnal Kultur*, 2(2), 108–118.
- Ripaldo, M. (2024). Analisis kesalahan berbahasa pada berita Kebumen24.com. *Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, 11(2), 347–352. <https://doi.org/10.30595/mtf.v11i2.23903>
- Whitney, L. E. (1994). *Qualitative research methods and educational studies*. Academic Press.

Widodo, J. (2024). *Pidato lengkap Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2024*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/4264759>